

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian partisipasi masyarakat

Menurut Al-Syaibani, masyarakat dalam pengertian yang paling sederhana ialah kumpulan individu dan kelompok yang di ikat oleh kesatuan Negara, kebudayaan dan agama. Termasuk segala jalinan hubungan yang timbal balik, kepentingan bersama, adat kebiasaan, pola-pola, teknik-teknik, syistem hidup, undang-undang, institusi dan segala segi dan phenomena yang di rangkum oleh masyarakat dalam pengertian luas dan baru.¹

Partisipasi adalah proses aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya yaitu: (1) adanya kemauan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk berpartisipasi (Slamet, 1992). Peran serta masyarakat adalah kontribusi, sumbangan, dan keikutsertaan masyarakat dalam menunjang upaya peningkatan mutu pendidikan. Pada masa sekarang tentunya Anda juga setuju, bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pendidikan melibatkan peran serta masyarakat. Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang dapat memberikan harapan dan

¹ Omar Mohammad Al-Toumy Al-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 163.

kemungkinan lebih baik di masa yang akan datang, mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat. Hal inilah yang melahirkan kesadaran peran serta masyarakat.

Dalam implementasi partisipasi masyarakat, seharusnya anggota masyarakat merasa bahwa tidak hanya menjadi objek kebijakan dari pemerintah, tetapi harus dapat mewakili masyarakat itu sendiri sesuai dengan kepentingan mereka. Perwujudan partisipasi masyarakat dapat dilakukan, baik secara individu atau kelompok, bersifat spontan atau terorganisasi, secara berkelanjutan atau sesaat, serta dengan cara-cara tertentu yang dapat dilakukan.

Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pendidikan Indonesia, perlu ditumbuhkan adanya kemauan dan kemampuan warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan. Sebaliknya pihak pemerintah atau Negara juga memberikan ruang atau kesempatan kepada warga atau kelompok masyarakat untuk berpartisipasi seluas mungkin sehingga kita bisa mencetuskan sebuah ide yang kreatif dan imajinatif dalam pengembangan pendidikan, seperti pepatah orang Jawa “Rawe-rawe rantas, malang-malang putung” atau dalam Bahasa Indonesianya “Bercerai kita runtuh, Bersatu kita teguh”

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suryadi Prawirosentono, bahwa ada 6 hal yang bisa mempengaruhi produk dan salah satunya

adalah SDM. SDM kita ibaratkan sebagai kelompok masyarakat, yang mana bisa membawa pengaruh pendidikan yang ada dalam sebuah Negara. Lebih dari itu, pemerintah perlu menyusun mekanisme sehingga orang tua dan kelompok-kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara optimal dalam pengembangan pendidikan di Indonesia.²

Peran serta masyarakat menjadi penting karena pendidikan merupakan kegiatan yang berlangsung di tengah masyarakat itu sendiri, bahkan dilakukan oleh masyarakat dan dimanfaatkan pula oleh masyarakat. Dapat pula dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya pendidikan dapat dipengaruhi oleh masyarakat dan hasil pendidikan akan mempengaruhi masyarakat. Pengaruh masyarakat terhadap pendidikan tidak saja terhadap lembaga pendidikan saja, tetapi juga terhadap individu peserta didik.³

Pendidikan atau sekolah mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat karena saling membutuhkan satu sama lain.⁴ Dengan demikian pendidikan mempunyai kepentingan terhadap masyarakat dan masyarakat mempunyai kepentingan terhadap pendidikan. Berarti pendidikan dan masyarakat merupakan suatu pertalian yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan berasal dari

² Suryadi Prawirosentono, *Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadu* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 12.

³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 1977), 49.

⁴ Made Pidarta, *Landasan Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 182.

masyarakat dan masyarakat berasal dari pendidikan. Selain berkepentingan terhadap hasil pendidikan, masyarakat juga berkepentingan terhadap lembaga pendidikan seperti sekolah yang merupakan tempat untuk mewariskan kebudayaan masyarakat kepada anak.⁵

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dikemukakan oleh Yusufhadi Miarso bertujuan untuk:

- 1) Terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan.
- 2) Terselenggaranya kerja sama yang saling menguntungkan (memberi dan menerima) antara semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.
- 3) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan seperti dana, fasilitas, dan peraturan-peraturan termasuk perundang-undangan.
- 4) Meningkatkan kinerja sekolah yang berarti pula meningkatnya produktivitas, kesempatan memperoleh pendidikan, keserasian proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi anak didik dan lingkungan, serta komitmen dari para pelaksana pendidikan.⁶

⁵ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 186.

⁶ Yusufhadi Miarso, *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), 709.

Berbicara tentang humas, hubungan masyarakat sering kita persamakan dengan istilah bahasa asingnya dengan istilah *Public Relations*, dan tentunya dalam berhubungan dengan masyarakat harus melakukan manajemen humas. Manajemen humas merupakan sebuah proses yang terdiri atas fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan hubungan masyarakat dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan secara efisien.⁷

Berdasarkan definisi di atas pengertian humas dalam pendidikan tidak terlepas dari manajemen dan begitu sebaliknya hubungan masyarakat tidak akan berjalan tanpa manajemen atau dengan kata lain manajemen hubungan masyarakat dengan lembaga pendidikan secara internal (guru, karyawan, siswa) dan eksternal (wali siswa, masyarakat, institusi luar, patner sekolah). Dalam konteks ini jelas bahwa humas atau public relation adalah termasuk salah satu elemen yang penting dalam suatu organisasi kelompok ataupun secara individu.

Manajemen humas memiliki fungsi pokok yang tidak jauh beda dengan manajemen secara umum. Fungsi manajemen Humas secara garis besar meliputi: *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (penggerakan), *Coordinating* (pengkoordinasian). Menurut peneliti tidak cukup dengan fungsi diatas, untuk menvapai tujuan yang ingin dicapai maka ditambah

⁷ Mutiara S Panggabean, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 13.

Leading (pengarahan), *Motivating* (motivasi), *Fasilitating* (memfasilitasi), *Empowring* (pemberdayaan), *Evaluating* (evaluasi) dan *Communication* (komunikasi) dalam konteks kegiatan di lembaga pendidikan. Adapun penjabarannya penulis akan menjabarkannya satu persatu agar pemahaman kita mengenai fungsi manajemen humas di sebuah lembaga pendidikan bisa diimplementasikan fungsi tersebut sebagai berikut:

1) Fungsi perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dapat diartikan sebagai hal, cara atau hasil kerja merencanakan (berniat untuk melakukan sesuatu).⁸ Fungsi perencanaan meliputi kegiatan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan dan berapa jumlah biaya yang dibutuhkan. Dalam jangkauan waktunya perencanaan dibagi menjadi tiga (3) tahapan yakni: (1) perencanaan jangka pendek, (2) perencanaan jangka menengah dan (3) perencanaan jangka waktu panjang.

Perencanaan merupakan syarat mutlak bagi setiap kegiatan manajemen atau administrasi, tanpa perencanaan maka kegiatan atau pelaksanaan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan.⁹ Jadi fungsi perencanaan di sini adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk melaksanakan hubungan sekolah dengan masyarakat.

⁸ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 987.

⁹ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 48.

2) Fungsi pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas-tugas kepada orang lain yang terlibat dalam lembaga pendidikan.¹⁰ Fungsi pengorganisasian bertujuan untuk menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan. Fungsi pengorganisasian meliputi pembagian tugas kepada masing-masing pihak, membentuk bagian, mendelegasikan, menetapkan wewenang dan tanggungjawab, sistem komunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap karyawan. Pengorganisasian dapat pula dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta menetapkan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab. Adapun prinsip-prinsip pengorganisasian meliputi:

- a) Memiliki tujuan yang jelas.
- b) Ada kesatuan tujuan tindakan dan pikiran.
- c) Ada keseimbangan antara wewenang dan tanggungjawab.
- d) Pembagian tugas sesuai dengan kemampuan, keahlian dan bakat masing-masing, sehingga dapat menimbulkan kerja sama yang harmonis dan kooperatif.
- e) Bersifat permanen, trstruktur sesuai dengan kebutuhan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian.
- f) Ada jaminan keamanan bagi anggota.

¹⁰ George Terry R, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 9.

g) Ada tanggungjawab serta tatakerja yang jelas dalam struktur organisasi.¹¹

Jadi pengorganisasian humas pada dasarnya semua komponen sekolah adalah pelaksana hubungan sekolah dengan masyarakat. Oleh karena itu, tugas dan fungsi mereka perlu ditata, sehingga penyelenggaraan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3) Fungsi penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan (*Actuating*) didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada anggota sedemikian rupa sehingga mereka bersedia bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Fungsi penggerakan dilakukan untuk merangsang anggota-anggota melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik.

Dalam pelaksanaan Humas perlu diperhatikan koordinasi antara berbagai bagian kegiatan dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Penggerakan dilakukan oleh pemimpin lembaga pendidikan seperti kepala yayasan atau pembina pondok pesantren.

4) Fungsi pengkoordinasian (*Coordinating*)

Pengkoordinasian berarti menjaga agar masing-masing tugas yang telah diberi wewenang dan tanggung jawab di laksanakan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan.

¹¹ Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), 17.

5) Fungsi pengarahan (*Leading*)

Fungsi pengarahan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan bersama tetap melalui jalur yang ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan yang menimbulkan terjadinya kesalahan dan pemborosan.

6) Fungsi pengawasan (*Controlling*)

Fungsi pengawasan dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk mengetahui realisasi lembaga pendidikan. Secara umum pengawasan dikaitkan dengan upaya mengendalikan, membina dan pelurusan sebagai upaya pengendalian kualitas pendidikan secara sistematis.¹²

7) Fungsi motivasi (*Motivating*)

Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan. Secara umum motivasi dapat didefinisikan sebagai faktor-faktor yang menggerakkan dan mengarahkan tingkah laku. Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup.

Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam

¹² Ahmad Fatah Yasin, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 25.

kehidupan Motivasi merupakan proses psikis yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat pula dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri (*drive arousal*).¹³

8) Fungsi fasilitas (*Fasilitating*)

Fasilitas adalah semua hal yang dibutuhkan oleh Humas dalam meningkatkan mutu manajemen sekolah yang ada, untuk memacu dan mengupayakan terwujudnya fungsi manajemen humas yang baik disuatu lembaga. Sebenarnya konsep dan aplikasi Humas dalam suatu lembaga mudah dilaksanakan yang penting sadar akan fungsi dan tugas dalam manajemen lembaga.

9) Fungsi pemberdayaan (*Empowering*)

Pemberdayaan adalah proses memberdayakan orang-orang dalam suatu lembaga untuk menjadikan lembaga tersebut menjadi lebih maju. Humas dalam pemberdayaan manajemen sekolah menjadikan pendidikan sebagai praktik pemberdayaan, dimana misi menjadikan manusia sebagai basis utama atau titik sentral.

10) Fungsi evaluasi (*Evaluating*)

Humas dapat dievaluasi atas kerja yang selama ini dilakukan dengan dua kriteria. Pertama efektivitasnya, yakni sampai sejauh mana tujuan telah tercapai, misalnya apakah memang masyarakat sudah merasa terlibat dalam masalah yang dihadapi sekolah, apakah mereka mau memberikan masukan untuk perbaikan sekolah dan

¹³ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 93.

sebagainya. Kedua efisiennya, yakni sampai seberapa jauh sumber yang ada yang potensial telah digunakan secara baik untuk kepentingan kegiatan masyarakat.

Evaluasi ini dilakukan pada waktu proses kegiatan sedang berlangsung atau pada akhir suatu program untuk melihat seberapa jauh keberhasilannya.

Menurut M. Sobry Sutikno, tugas pokok Humas adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi dan gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang menjadi sasaran.
- b) Menjadi perantara pemimpin dalam bersosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak-pihak lain yang membutuhkan.
- c) Membantu pemimpin dalam mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan dan informasi yang akan diberikan kepada masyarakat yang menarik pada saat tertentu.
- d) Membantu pemimpin untuk mengembangkan rencana dan kegiatan lanjutan yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat, sebagai koskuensi dari komunikasi timbal balik dengan pihak luar untuk menumbuhkan

harapan penyempurnaan kegiatan yang telah dilakukan lembaga pendidikan.¹⁴

Oleh sebab itu, tugas dan fungsi Humas dilembaga pendidikan Islam harus dibangun dengan manajemen yang profesional penting pula untuk melakukan komunikasi langsung dengan elemen *stakeholders* lainnya untuk membangun dan memperkuat silaturahmi.¹⁵ Diantara program humas adalah memperkenalkan misi, visi, tujuan, program, kegiatan-kegiatan dan prestasi-prestasi yang di lahirkan sebuah lembaga pendidikan.

2. Pengertian upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upaya adalah ikhtiar atau untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dsb. Dengan demikian maka upaya adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi.

3. Pengertian meningkatkan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “meningkatkan” diartikan dengan: “menaikkan, mempertinggi, dan memperhebat”.

4. Pengertian mutu

Mutu adalah (ukuran) baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan dsb). Definisi mutu mempunyai

¹⁴ M. Sobry Sutikno, *Manajemen Pendidikan, Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang Unggul (Tinjauan Umum dan Islami)* (Lombok: Holistica, 2012), 94.

¹⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Melahirkan Madrasah Unggulan, Merintis dan Mengelola Madrasah yang Komperhensif* (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 103.

pengertian yang sangat bervariasi. Terdapat beberapa pendapat yang merumuskan tentang definisi mutu, antara lain:

Menurut Mulyadi pendidikan yang berfokus pada mutu adalah bahwa dasar mutu sebuah sekolah mengembangkan program dan layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna seperti siswa dan masyarakat. Menurut Philips, mutu yaitu sesuai yang disyaratkan atau yang distandarkan yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan baik inputnya, prosesnya maupun outputnya. Sedangkan Armand, mengemukakan bahwa mutu merupakan kepuasan pelanggan sepenuhnya.¹⁶

5. Pengertian pendidikan

Kegiatan pendidikan merupakan kegiatan sehari-hari yang kompleks dan rumit. Dalam Pidato Landasan Pendidikan, Analisis Keilmuan, Teorisasi dan Praktek Pendidikan, Prof. Dr. Mohammad Dimiyati dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar IKIP Malang 1996. Pendidikan merupakan kewajiban yang harus kita kenali semenjak dari lahir. Karena dari pendidikan itulah kita akan tahu banyak tentang wawasan di dunia dalam kehidupan ini.

6. Mutu pendidikan

a. Pengertian mutu pendidikan

Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan

¹⁶ Mulyadi. *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Mutu* (Malang: UIN Maliki press, 2010), 76.

kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Jadi mutu pendidikan adalah kualitas dari pendidikan secara menyeluruh baik dari input, proses, dan output pendidikan itu sendiri.

b. Dasar-dasar Program Mutu Pendidikan

Banyaknya masalah yang diakibatkan oleh lulusan pendidikan yang tidak bermutu, program mutu atau upaya-upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Untuk melaksanakan program mutu diperlukan beberapa dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut :

1) Komitmen pada perubahan

Pemimpin atau kelompok yang ingin menerapkan program mutu harus memiliki komitmen atau tekad untuk berubah. Pada intinya, peningkatan mutu adalah melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih berbobot.

2) Pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada

Banyak kegagalan dalam melaksanakan perubahan karena melakukan sesuatu sebelum sesuatu itu jelas.

3) Mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan

Hendaknya, perubahan yang akan dilakukan berdasarkan visi tentang perkembangan, tantangan, kebutuhan, masalah, dan peluang yang akan dihadapi pada

masa yang akan datang. Pada awalnya, visi tersebut hanya dimiliki oleh pimpinan atau seorang inovator, kemudian dikenalkan kepada orang-orang yang akan terlibat dalam perubahan tersebut. Visi dapat menjadi pedoman yang akan membimbing tim dalam perjalanan pelaksanaan program mutu.

4) Mempunyai rencana yang jelas

Rencana menjadi pegangan dalam proses pelaksanaan program mutu. Pelaksanaan program mutu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal tersebut akan selalu berubah.¹⁷

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa untuk mencapai mutu pendidikan yang baik diperlukan dasar-dasar yang kuat meliputi: komitmen pada perubahan, pemahaman yang jelas dengan kondisi yang ada, mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan, serta mempunyai rencana yang jelas di dalam lembaga tersebut.

c. Prinsip-prinsip Peningkatan Mutu

Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan di antaranya sebagai berikut.

¹⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, et. Al., *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah (Konsep, Prinsip, dan Instrumen)* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 9.

- 1) Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu pendidikan merupakan alat yang dapat digunakan oleh para profesional pendidikan dalam memperbaiki sistem pendidikan bangsa kita.
- 2) Kesulitan yang dihadapi para profesional pendidikan adalah ketidakmampuan mereka dalam menghadapi “kegagalan sistem” yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada.
- 3) Peningkatan mutu pendidikan harus melakukan loncatan-loncatan. Norma dan kepercayaan lama harus diubah. Para profesional pendidikan harus membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global.
- 4) Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan kantor Diknas yang mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, *team work*, kerja sama, akuntabilitas, dan rekognisi.

- 5) Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan pendidikan.
- 6) Banyak profesional di bidang pendidikan yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki para kerja bersifat global.
- 7) Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan.
- 8) Salah satu komponen kunci mutu dalam program mutu adalah sistem pengukuran. Dengan menggunakan sistem pengukuran memungkinkan para profesional pendidikan dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua maupun masyarakat.
- 9) Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan “program

singkat”, peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program-program singkat.¹⁸

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa prinsip peningkatan mutu adalah komitmen pada perubahan, maksudnya jika semua guru dan staf sekolah mempunyai komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan pendidikan yang ada di sekolah tersebut.

d. Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk memperbaiki mutu pendidikan diperlukan keterlibatan semua pihak. Karena perbaikan pendidikan bukan tanggungjawab menteri pendidikan saja, atau dirjen, rektor, dekan, dan kepala sekolah saja. Semua yang peduli dengan nasib bangsa di masa depan harus merasa terpanggil untuk membenahi benang kusut yang ada dalam sistem pendidikan nasional.

Menurut Syafaruddin, berbagai upaya untuk meningkatkan mutu sekolah perlu dilakukan hal-hal berikut, yaitu:

- 1) Menyamakan komitmen mutu oleh kepala sekolah, para guru dan pihak terkait (*stakeholders*), mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran.

¹⁸ Ibid., 9-11.

- 2) Mengusahakan adanya program peningkatan mutu madrasah (kurikulum/pengajaran, pembinaan siswa, pembinaan guru, keuangan, sarana dan prasarana, serta kerjasama dengan *stakeholders* madrasah, meliputi jangka panjang dan jangka pendek.
- 3) Meningkatkan pelayanan administrasi sekolah.
- 4) Kepemimpinan kepala madrasah yang efektif.
- 5) Ada standar mutu lulusan.
- 6) Jaringan kerjasama yang baik dan luas.
- 7) Penataan organisasi madrasah yang baik (tata kerja).
- 8) Menciptakan iklim dan budaya sekolah yang kondusif.¹⁹

Sebuah sekolah dikatakan berkualitas bila ada program unggulan, guru memiliki kepuasan kerja, dan para siswa/orang tua siswa puas dengan program pembelajaran, pembinaan mental dan keterampilan yang prospektif, sehingga mereka dapat lulus di jenjang sekolah lebih tinggi yang unggul. Untuk mencapai hal yang dimaksud maka diperlukan, sudah barang tentu kepala madrasah harus orang yang berpengetahuan luas, kreatif dan bersikap proaktif, bukan menunggu dan bekerja dengan cara rutinitas saja.

¹⁹ Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 290.